

**ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT DENGAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR DI PROPINSI JAMBI DALAM
MEWUJUDKAN GOOD GOVERNMENT GOVERNANCE**



Skripsi Oleh:

**DIAN M. SIMANJUNTAK
NIM 51053130045**

**Untuk Memenuhi Sebagian dari Syarat-syarat
Guna Mencapai Gelar
Sarjana Ekonomi**

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI
INDERALAYA
Tahun 2009**

S
G57.4807
sim
d
e-090787
wy

**ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT DENGAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR DI PROPINSI JAMBI DALAM
MEWUJUDKAN GOOD GOVERNMENT GOVERNANCE**



Skripsi Oleh:

**DIAN M. SIMANJUNTAK
NIM 01053130045**

**Untuk Memenuhi Sebagian dari Syarat-syarat
Guna Mencapai Gelar
Sarjana Ekonomi**

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI
INDERALAYA
Tahun 2009**

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI
INDERALAYA**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : DIAN M. SIMANJUNTAK
NIM : 01053130045
JURUSAN : AKUNTANSI
MATA KULIAH : AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TAJUNG
JABUNG BARAT DENGAN KABUPATEN TANJUNG
JABUNG TIMUR DI PROPINSI JAMBI DALAM
MEWUJUDKAN *GOOD GOVERNMENT GOVERNANCE*


PEMBIMBING SKRIPSI :

TANGGAL PERSETUJUAN

DOSEN PEMBIMBING

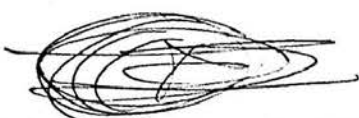
Tanggal 7 Mei 2009

Ketua :


Rina Tjandrakirana D.P., S.E., M.M., Ak.
NIP. 132000097

Tanggal 7 Mei 2009

Anggota:


Sulaiman S. Manggala, S.E., M.B.A., Ak.
NIP. 132000094

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI
INDERALAYA

TANDA PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF

NAMA : DIAN M. SIMANJUNTAK
NIM : 01053130045
JURUSAN : AKUNTANSI
MATA KULIAH : AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TAJUNG
JABUNG BARAT DENGAN KABUPATEN TANJUNG
JABUNG TIMUR DI PROPINSI JAMBI DALAM
MEWUJUDKAN *GOOD GOVERNMENT GOVERNANCE*

Telah diuji di depan panitia ujian komprehensif pada tanggal 7 Mei 2009 dan telah memenuhi syarat untuk diterima.

Panitia Ujian Komprehensif

Inderalaya, 7 Mei 2009

Ketua,



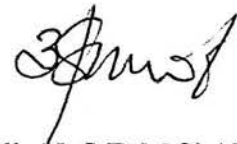
Rina Tjandrakirana DP,S.E.,M.M.,Ak
NIP. 132000097

Anggota,



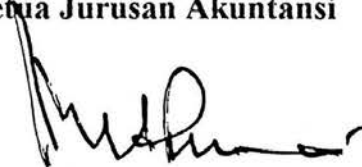
Sulaiman S.M.,S.E.,M.B.A.,Ak
NIP. 132000094

Anggota,



Emylia Y.,S.E.,M.Si,Ak
NIP. 132130472

**Mengetahui,
Ketua Jurusan Akuntansi**



Drs. Burhanuddin, M.Acc.,Ak
NIP. 131801649

MOTO

KARENA HIKMAT LEBIH BERTARAF DARI PADA PERMATA, APA PUN YANG DIINGINKAN ORANG, TIDAK DAPAT MENYAMAINYA. (Amsal 8:11)

Carilah dahulu Kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu (Matius 6:33)

FOCUS ON WHERE YOU WANT TO GO, NOT ON WHAT YOU FEAR
(Anonymous)

Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi TUHANlah yang menentukan arah langkahnya (Amsal 16:9)

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

- ❖ *My Lord Jesus Christ*
- ❖ Kedua Orang Tuaku tercinta
- ❖ Adik-adikku tersayang
- ❖ Sahabat-sahabatku
- ❖ Almamaterku

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya penulisan skripsi ini dapat diselesaikan sebagaimana mestinya.

Penulisan skripsi ini mengambil judul **Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Dengan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Di Propinsi Jambi Dalam Mewujudkan *Good Government Governance***. Penulisan skripsi ini dibagi dalam lima bab, Bab I Pendahuluan, Bab II Landasan Teori, Bab III Gambaran Umum, Bab IV Pembahasan, dan Bab V Kesimpulan dan Saran.

Data utama yang digunakan adalah data primer kabupaten diperoleh dengan cara wawancara dan dokumentasi sumber-sumber yang berkaitan dengan penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kab. Tanjung Jabung Barat maupun Kab. Tanjung Jabung Timur terkait dalam mewujudkan *Good Government Governance* kurang begitu baik hal ini dikarenakan kedua pemda ini belum mandiri dalam menjalankan pemerintahannya dengan kata lain daerah belum mampu melaksanakan otonomi daerah secara finansial, kedua daerah masih sangat tergantung pada Dana Perimbangan terutama Dana Alokasi Umum dalam membiayai belanja daerahnya walaupun dalam pencapaian efektivitas dan efisiensi PAD serta pertumbuhan PADnya sudah baik dan selama tiga tahun ini kedua pemda selalu mengalami surplus.

Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan kontribusi bagi perbaikan kinerja keuangan pemda dan menjadi acuan untuk penelitian dan pengembangan selanjutnya mengenai kinerja keuangan pemda terutama rasio keuangannya.

Penulis

Dian M. Simanjuntak

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan Syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Dengan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Di Propinsi Jambi Dalam Mewujudkan *Good Government Governance*” sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar sarjana ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan memberi dukungan baik moril maupun material dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Prof. Dr. Hj. Badia Perizade, M.B.A., Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Dr. H. Syamsurijal, AK., Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
3. Drs. Burhanuddin, M.Acc., Ak, Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
4. Rina Tjandrakirana D.P, M.M., Ak., Pembimbing I Skripsi.
5. Sulaiman S. Manggala, S.E., M.B.A., Ak., Pembimbing II Skripsi.
6. Emilya Yuniarti, S.E., M.Si., Ak, Penguji Skripsi.
7. Mukhtaruddin, S.E., M.Si., Ak, Pembimbing Akademik.
8. Semua Bapak/Ibu dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama penulis mengikuti kuliah di Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
9. Staf pegawai Pemerintah Kab. Tanjab Barat dan Kab. Tanjab Timur
10. Kedua orang tuaku yang tercinta, Drs. S.P.E. Simanjuntak dan M. L. Tobing, S.Pd, yang telah memberikan dukungan moril dan pendanaan serta selalu membawa namaku dalam doa-doa mereka.
11. Kedua Adik-adikku, Gunnar P. Simanjuntak dan Josafat Simanjuntak. Kakak bangga punya adik-adik seperti kalian.
12. Teman-teman warga Pondok Puspa Indah.
13. Staf pegawai Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
14. Teman-teman angkatan 2005 Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya khususnya Muthmainnah, Rulia Atika, Yeni Kurniawati, Dian Kamila, Erni Simanjuntak, Arwadi Pakpahan, Edy Sembiring, Hendra Sihombing, Musa Napitupulu, David Tampubolon, Nira Astuti, Angelina Aulia dan lainnya yang tak dapat disebut satu per satu. Kalian selalu ada di hatiku

Semoga Tuhan Yang Maha Pengasih membalas budi baik mereka dan melimpahkan berkatNya kepada kita semua.

Penulis,

Dian M. Simanjuntak

Special Thanks

1. My True Love **Jesus Christ**, for His Bless and Merci that given to me so I could be I am.
2. My **Father and Mama**, I know that I am not good enough to be your girl but I realize how blessed I am to be your daughter!!!!
3. My 2 big Brothers, **Gunnar** [thx bro 4 everything...you are more than just my brother. You are my buddy, my teacher and sometime you are my father :).... you have taught me a lot more than I can realize] & **Josafat** [you are my sunshine, I feel much better beside you, Bendol. You are still my little brother though you have been BIG but I know you'll be a great man someday (more than us)]. I am really proud to have both of you.
4. My Big relatives of Simanjuntak and Tobing, wherever they are. Thank you all for your supports and prays. Hope God always blesses our big families.
5. Kel. M. Sitompul (alm) Br Simanjuntak, khususnya kepada naboru yang menganggapku sudah seperti anak sendiri dan mau menampungku sejak pertama kali kakiku berpijak di Palembang, juga kepada Christine yang bersedia mengantar hingga ke Inderalaya.
6. My big family of Tuan Somanimbl (especially The Simanjuntaks) and Si Ompat Pisoran in Inderalaya. Thanks folks for being my family for years.
7. Someone who plays in my heart and mind. There is no enough word and there is no word enough as well to illustrate my feeling.
8. The fellows of Pondok Puspa Indah: Rita G + Dewi T. + Jojo G., Christine B., Vivi VA, Nety, Ridho M., Abed S., Franky AH., Daniel RH., Melky H., Feri F., Jonathan H., Hasian HS., Roy AS., Antoni AA., Sylvia A., Septriani L, Fabyo T., Oka HS., Joy LS., Rikson S., you all have filled my life for years. You show me the sweet and the bitter of life. Thanks Guys. You are my sisters and brothers, nice to know you all.
9. My Roommate and my best pal forever.....Eka Srimumiati Manurung, thanks 4 everything Beibh.....I thing I won't be able to find such a good pal like you...You are the best. Love you. Ehm, I still keep in my mind that someday we will be 'BESAN'! Sorry ya klo slama ini sudah menyusahkanmu dan suka bertingkah 'aneh' ;P.

10. My little girl, Francia Anggraeni. You have a big heart, Ci... Love to be one of your pals. You will be always having a place in my heart.
11. Mr. Otman and Family, for giving such a lovely boarding house, Pondok Puspa Indah. Hope it always be lovely.
12. My best friends and my sisters all at once, Muthmainnah, Rulia Atika, Yeni Kurniawati, Dian Kamila. Thanks girls for being my sisters since our first years in college. I know without you all I am nobody. You are my treasures. Nothing can compare it.
13. My comrades, The Gerobak: Arwadi H.P., Edy M.S., Emi A.S., Hendra T.P.S., Musa R.T.P.N., and David A.A.T. Thanks for each laugh you share to me... My life is much pretty cheerful because of you all.
14. My comrades in fight of Final Examinations especially Agelina Aulia, Nira Astuti, Novita Fajar Sari, Indrayani, Tinda Wiranasari, Novita Sari Anggraini, Aglin Jenova, Diah Pitaloka, Ummi Muthmainnah, Selly Anggraini, Aisyah, Tiara Annisa, Eka Murtina, Refisa Deliana, Rulia Atika, Dian Kamila, Emi Simanjuntak dan Ira Malinda. Finally, we did it girls! Finished our college, but I hope it doesn't make our friendship finished.
15. All Bataks of Economy Faculty. I hope we all can be more and more cohesive and getting along well in our campus.
16. 2005 Generation of Accounting. Nice to know people like you all guys. It was unforgettable memories studying with you together. Keep fighting to be a great accountant!!! Keep in touch folks. Sorry I didn't write down your names one by one, it doesn't mean I've forgot you. You are my assets that won't be depreciated. You will be always in my heart.
17. 2006-new Generation of Accounting. Give the best for our major, guys.
18. The staffs of Economy Faculty, especially Kak Suryadi that has worked hard at Accounting Department and helped all administration of our college.
19. Everyone who has helped me and given many contributions in my life, that I can not mention their names one by one.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PANITIA UJIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
ABSTRAKSI.....	xi
ABSTRACT.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Perumusan Masalah.....	5
1.3. Tujuan Penelitian.....	5
1.4. Manfaat Penelitian.....	5
1.5. Kerangka Penelitian.....	6
1.6. Metodologi Penelitian.....	11
1.6.1 Objek Penelitian.....	11
1.6.2 Metode Pengumpulan Data.....	11
1.7. Metode Analisis Data.....	12
1.8. Sistematika Pembahasan.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Anggaran Sektor Publik.....	17
2.1.1 Definisi Anggaran Sektor Publik.....	17
2.1.2 Karakteristik Anggaran Sektor Publik.....	17
2.1.3 Fungsi Anggaran Sektor Publik.....	18
2.1.4 Prinsip Anggaran Sektor Publik.....	18
2.1.5 Pentingnya Anggaran Sektor Publik.....	19
2.2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).....	20
2.2.1 Pengertian APBD.....	20
2.2.2 Pedoman Penyusunan APBD.....	21
2.2.3 Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran.....	25
2.2.4 Struktur APBD.....	25
2.3. Pengukuran Kinerja Sektor Publik.....	30
2.4. Konsep Rasio Keuangan.....	31
2.4.1 Definisi Rasio Keuangan.....	31
2.4.2 Keunggulan dan Keterbatasan Rasio Keuangan.....	31
2.4.3 Analisis Rasio Keuangan pada Perusahaan Swasta.....	32
2.4.4 Analisis Rasio Keuangan pada Sektor Publik (APBD).....	33
2.5. <i>Good Government Governance</i>	37

BAB III GAMBARAN UMUM	
3.1. Kabupaten Tanjung Jabung Barat	43
3.1.1 Sejarah Umum.....	43
3.1.2 Kondisi Fisik.....	44
3.1.3 Administrasi Pemerintahan.....	44
3.1.4 Visi, Misi dan Strategi Pembangunan.....	47
3.1.5 Potensi Perekonomian.....	48
3.2. Kabupaten Tanjung Jabung Timur	53
3.2.1 Sejarah Umum.....	53
3.2.2 Kondisi Fisik.....	53
3.2.3 Administrasi Pemerintahan.....	54
3.2.4 Visi, Misi dan Strategi Pembangunan.....	56
3.2.5 Potensi Perekonomian.....	57
3.3. Kondisi Keuangan.....	61
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN	
4.1. Analisis Perbandingan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah.....	74
4.2. Analisis Perbandingan Rasio Efektivitas dan Efisiensi PAD	79
4.2.1 Analisis Perbandingan Rasio Efektivitas PAD	79
4.2.2 Analisis Perbandingan Rasio Efisiensi PAD	81
4.3. Analisis Perbandingan Rasio Keserasian.....	83
4.4. <i>Debt Service Coverage Ratio(DSCR)</i>	86
4.5. Analisis Perbandingan Rasio Pertumbuhan.....	88
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1. Kesimpulan	90
5.2. Saran	92
DAFTAR PUSTAKA	94

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1	Kriteria Kemandirian Keuangan Daerah 13
Tabel 1.2	Kriteria Pengukuran Efektivitas 13
Tabel 1.3	Kriteria Pengukuran Efisiensi 14
Tabel 2.2	Pola Hubungan, Tingkat Kemandirian, dan Kemampuan Keuangan Daerah 32
Tabel 3.1	Daftar Kecamatan di Kab. Tanjabbar 45
Tabel 3.2	Daftar Kecamatan di Kab. Tanjabtim 54
Tabel 3.3	Laporan Realisasi APBD Kab. Tanjabbar Tahun Anggaran 2005.. 62
Tabel 3.4	Neraca APBD Kab. Tanjabbar Tahun Anggaran 2005 63
Tabel 3.5	Laporan Realisasi APBD Kab. Tanjabbar Tahun Anggaran 2006.. 64
Tabel 3.6	Neraca APBD Kab. Tanjabbar Tahun Anggaran 2006 65
Tabel 3.7	Laporan Realisasi APBD Kab. Tanjabbar Tahun Anggaran 2007.. 66
Tabel 3.8	Neraca APBD Kab. Tanjabbar Tahun Anggaran 2007 67
Tabel 3.9	Laporan Realisasi APBD Kab. Tanjabtim Tahun Anggaran 2005.. 68
Tabel 3.10	Neraca APBD Kab. Tanjabtim Tahun Anggaran 2005 69
Tabel 3.11	Laporan Realisasi APBD Kab. Tanjabtim Tahun Anggaran 2006.. 70
Tabel 3.12	Neraca APBD Kab. Tanjabtim Tahun Anggaran 2006 71
Tabel 3.13	Laporan Realisasi APBD Kab. Tanjabtim Tahun Anggaran 2007.. 72
Tabel 3.14	Neraca APBD Kab. Tanjabtim Tahun Anggaran 2007 73
Tabel 4.1	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah 75
Tabel 4.2	Kontribusi Komponen PAD terhadap Pembentukan PAD 75
Tabel 4.3	Kemampuan Keuangan Daerah dan Pola Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah 78
Tabel 4.4	Rasio Efektivitas PAD Kab. Tanjabbar dan Kab Tanjabtim 79
Tabel 4.5	Rasio Efisiensi PAD Kab. Tanjabbar dan Kab Tanjabtim 81
Tabel 4.6	Rasio Keserasian Kab. Tanjabbar dan Kab. Tanjabtim 80
Tabel 4.7	Alokasi Belanja Daerah Kab. Tanjabbar dan Kab. Tanjabtim 83
Tabel 4.8	Perhitungan DSCR Kab. Tanjabbar dan Tanjabtim 84
Tabel 4.9	Rasio Pertumbuhan APBD Kab. Tanjabbar 87

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Perhitungan Rasio Kemandirian	96
Lampiran 2 Perhitungan Rasio Efektivitas dan Efisiensi PAD	97
Lampiran 3 Komponen Belanja Rutin dan Belanja Pembangunan	99

**Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten
Tanjung Jabung Barat dengan Kabupaten Tanjung Jabung Timur di Propinsi
Jambi dalam Mewujudkan *Good Government Governance***

Dian M. Simanjuntak

ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan kinerja pemerintah daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan Tanjung Jabung Timur dalam mengelola keuangan daerahnya dalam mewujudkan *good government governance* dengan menggunakan rasio keuangan pada APBD.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa selama tahun 2005-2007 kinerja keuangan kedua pemda kurang begitu baik, kedua daerah ini belum mampu atau mandiri secara finansial dalam menjalankan otonomi daerah. Hal ini dikarenakan masih rendahnya PADnya yang diperoleh tiap tahunnya sehingga menyebabkan kedua daerah ini sangat tergantung pada Dana Perimbangan terutama Dana Alokasi Umum dalam membiayai belanja daerahnya. Namun jika dilihat dari efektivitas dan efisiensi PADnya begitu pula dengan pertumbuhan pendapatan dan belanja daerahnya yang memiliki kecenderungan positif, sudah cukup baik

Untuk memperbaiki kinerja keuangan kedua pemda, penulis menyarankan agar kedua pemda dapat lebih meningkatkan PADnya sebagai andalan penerimaan APBD, terutama yang berasal dari pajak dan retribusi daerah.

Kata Kunci: Kinerja Keuangan Pemda, APBD, Rasio Keuangan pada APBD, dan *Good Government Governance*.



Comparative Analysis of The Government Financial Performance of Tanjung Jabung Barat Regency and Tanjung Jabung Timur Regency in Jambi Province in Actualizing the Good Government Governance

Dian M. Simanjuntak

ABSTRACT

This research aims to compare the performance of government of Tanjung Jabung Barat Regency and Tanjung Jabung Timur Regency in managing their financial resources in actualizing the Good Government Governance by using financial ratios of APBD.

The result of this research has shown that during period of years 2005-2007, over all both of the governments financial performance were not good enough, they have not been capable in running the autonomy financially because their PAD each year were still low so they depend on the higher government to pay their expenditure very much. However, if we see from the ratios of effectiveness, efficiency of PAD and the growth of income and expense, the financial performance of these regencies were good enough.

In order to improve the financial performance, both of the government managements may increase their PAD as the major revenue of APBD, especially from Regional Tax and Retribution.

Keywords: *Government Financial Performance, APBD, Financial Ratios of APBD, and Good Government Governance.*



BAB I

PENDAHULUAN



1.1 Latar Belakang

Sektor publik sering dinilai negatif oleh beberapa pihak, misalnya sebagai sarang inefisiensi, pemborosan, sumber kebocoran dana dan institusi yang selalu merugi (Mardiasmo, 2002:27). Reformasi politik di Indonesia telah mengubah sistem kehidupan bernegara. Orientasi pembangunan sektor publik menurut *World Bank* dan *United Nation Development Program (UNDP)* adalah untuk menciptakan *good governance*. *World Bank* dalam Mardiasmo (2002:17) mendefinisikan *governance* sebagai “*the way state power is used in managing economic and social resources for development of society*” (cara pemerintah mengelola sumber daya sosial dan ekonomi untuk kepentingan pembangunan masyarakat). Sementara itu UNDP mendefinisikan *governance* sebagai “*the exercise of political, economic, and administrative authority to manage a nation’s affair at all levels*”, dalam hal ini UNDP lebih menekankan pada aspek politik, ekonomi, dan administrasi dalam pengelolaan negara.

Good Government Governance (GGG) setidaknya ditandai dengan tiga elemen yaitu transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Partisipasi maksudnya mengikutsertakan keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Sedangkan akuntabilitas adalah pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan.

Untuk mewujudkan GGG diperlukan perubahan paradigma pemerintahan yang mendasar dari sistem lama yang serba sentralistis, dimana pemerintah pusat sangat kuat dalam menentukan kebijakan. Paradigma baru tersebut menuntut suatu sistem yang mampu mengurangi ketergantungan dan bahkan menghilangkan ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, serta bisa memberdayakan daerah agar mampu berkompetisi baik secara regional, nasional maupun internasional. Menanggapi paradigma baru tersebut maka pemerintah memberikan otonomi kepada daerah seluas-luasnya yang bertujuan untuk memungkinkan daerah mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri agar berdaya guna dan berhasil guna dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan otonomi seluas-luasnya dan secara proporsional kepada daerah yang diwujudkan dengan adanya pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta adanya perimbangan keuangan antara pusat dan daerah.

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan otonomi daerah, maka perwujudan GGG memerlukan reformasi pengelolaan keuangan daerah dan reformasi keuangan negara. Peraturan perundangan yang berkenaan dengan pengelolaan keuangan daerah yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Sedangkan tiga paket perundang-undangan di bidang keuangan negara yang menjadi landasan hukum bagi reformasi di bidang keuangan negara sebagai upaya untuk mewujudkan GGG yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, serta Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengawasan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara yang memayungi pengelolaan keuangan negara maupun keuangan daerah.

Otonomi daerah merupakan upaya pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan daerah berkaitan dengan pengelolaan sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kepentingan, prioritas dan potensi daerah tersebut. Dengan adanya otonomi ini, daerah diberikan kewenangan yang luas untuk mengurus rumah tangganya sendiri dengan sedikit mungkin campur tangan pemerintah pusat. Pemerintah daerah mempunyai hak dan kewenangan yang luas untuk menggunakan sumber-sumber keuangan yang dimilikinya sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang berkembang di daerah. Kewenangan yang luas tersebut, tidaklah berarti pemerintah daerah dapat menggunakan sumber-sumber keuangan yang dimiliki sehendaknya tanpa arah dan tujuan yang jelas. Hak dan kewenangan yang luas diberikan kepada daerah yang harus dipertanggungjawabkan secara akuntabel dan transparan, baik kepada masyarakat di daerah maupun kepada pemerintah pusat yang telah membagikan dana perimbangan kepada seluruh daerah di Indonesia.

Kebijakan GGG (pengelolaan pemerintah yang baik) merupakan tuntutan yang harus dipenuhi oleh sektor publik. Laporan keuangan menjadi fokus utama, sebagaimana yang tertuang dalam PP No. 105/2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang diganti menjadi PP No. 58/2005 yang mensyaratkan perlu dilakukannya pertanggungjawaban dalam bentuk laporan keuangan (neraca daerah, arus kas, dan realisasi anggaran). Untuk itu diperlukan suatu laporan keuangan yang handal dan dapat dipercaya agar dapat menggambarkan

sumber daya keuangan daerah berikut dengan analisis kinerja pengelolaan sumber daya keuangan daerah itu sendiri (Bastian, 2006:6).

Kabupaten Daerah Tingkat II Tanjung Jabung diresmikan menjadi daerah kabupaten pada tanggal 10 Agustus 1965 yang dikukuhkan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 (Lembaran Negara Nomor 50 Tahun 1965). Seiring dengan dinamika dan perkembangan pembangunan di Propinsi Jambi, berdasarkan Undang-undang Nomor 54 tertanggal 04 Oktober 1999, tentang pemekaran wilayah kabupaten dalam Propinsi Jambi, maka Kabupaten Tanjung Jabung dipecah menjadi Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan Ibukota Kuala Tungkal dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan Ibukota Muara Sabak.

Sebagai daerah otonom, kedua kabupaten tersebut telah sembilan tahun berdiri setelah dilakukan pemekaran. Namun demikian, masih banyak hal yang perlu dibenahi dan diperhatikan dalam pelaksanaan GGG, salah satunya ialah penyusunan laporan keuangan dalam rangka peningkatan kualitas laporan keuangan. Oleh karena itu, kinerja pemda dalam menyusun laporan keuangan perlu dinilai. Penilaiannya dapat dilakukan dengan penggunaan analisis rasio keuangan sebagai alat bantu menganalisis laporan keuangan terutama pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan membandingkan hasil yang diperoleh pada masing-masing kabupaten, sehingga laporan keuangan yang dimaksud dapat meningkatkan kredibilitasnya dan pada gilirannya akan dapat mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Sehingga, GGG dapat tercapai.

Melihat begitu pentingnya penilaian terhadap kinerja pemda dalam mengelola keuangan daerahnya penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai analisis kinerja keuangan dengan menggunakan rasio keuangan melalui penelitian

yang berjudul “ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT DENGAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR DI PROPINSI JAMBI DALAM MEWUJUDKAN *GOOD GOVERNMENT GOVERNANCE*”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini ialah bagaimana perbandingan kinerja pemerintah daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam mengelola keuangan daerahnya dalam mewujudkan *Good Government Governance*.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini ialah untuk membandingkan kinerja pemerintah daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan Tanjung Jabung Timur dalam mengelola keuangan daerahnya dalam mewujudkan *Good Government Governance*.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Bagi penulis

Penulis dapat membandingkan teori yang didapat di bangku kuliah dengan realita yang ada di masyarakat serta menambah wawasan tentang akuntansi sektor publik terutama mengenai analisis rasio terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

2. Bagi Akademik

Sebagai tambahan informasi dan masukan untuk membantu memberikan gambaran yang lebih jelas bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian mengenai rasio keuangan sektor publik.

3. Bagi Pemerintah Daerah (Pemda)

Sebagai masukan mengenai kinerja keuangannya yang akan membantu pemda mewujudkan *Good Government Governance*.

1.5 Kerangka Pemikiran

Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi. Pengukuran kinerja adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, termasuk informasi atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa, kualitas barang dan jasa, hasil kegiatan dibandingkan dengan maksud yang diinginkan, dan efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan.

Sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan nonfinansial. Pengukuran kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas organisasi dan manajer dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik.

Rasio keuangan adalah angka yang diperoleh dari hasil perbandingan dari satu pos laporan keuangan dengan pos lainnya yang mempunyai hubungan yang relevan dan signifikan (Harahap, 1998:207). Rasio keuangan merupakan alat untuk menyediakan pandangan terhadap kondisi yang mendasari mengenai suatu organisasi bisnis. Rasio keuangan juga dapat mengungkapkan hubungan penting dan menjadi

dasar perbandingan dalam menemukan kondisi dan trend yang sulit dideteksi dengan mempelajari masing-masing komponen yang membentuk rasio keuangan.

Analisis keuangan adalah usaha mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan (Halim, 2004). Analisis rasio keuangan pada APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang diperoleh dari suatu daerah dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Selain itu dapat pula dilakukan dengan cara membandingkan rasio keuangan di suatu daerah tertentu dengan rasio keuangan daerah lain yang terdekat ataupun potensi daerahnya relatif sama untuk dilihat bagaimana posisi rasio keuangan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah daerah lainnya.

Penggunaan analisis rasio terhadap APBD perlu dilakukan meskipun kaidah pengakuntansian dalam APBD berbeda dalam laporan keuangan yang dimiliki perusahaan swasta. Beberapa analisis laporan keuangan bisnis tidak sesuai/cocok untuk diterapkan pada sektor publik. Rasio keuangan yang dapat dikembangkan berdasarkan data keuangan yang bersumber dari APBD, antara lain:

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah.

Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber yang lainnya misalnya pemerintah pusat ataupun dari pinjaman. Suatu daerah dikatakan mandiri apabila rasio kemandiriannya mencapai minimal 50%.

2. Rasio Efektivitas dan Efisiensi Pendapatan Asli Daerah

Rasio Efektivitas menggambarkan kemampuan pemda dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.

Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima.

3. *Debt Service Coverage Ratio (DSCR)*

Dalam rangka melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana di daerah, selain menggunakan Pendapatan Asli Daerah dapat menggunakan alternatif sumber lain yaitu dengan melakukan pinjaman, sepanjang prosedur dan pelaksanaannya sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu :

a. Ketentuan yang menyangkut persyaratan

- Jumlah kumulatif pinjaman daerah yang wajib dibayar maksimal 75% dari penerimaan APBD tahun sebelumnya.
- DSCR minimal 2,5.

b. Ketentuan yang menyangkut penggunaan pinjaman

- Pinjaman jangka panjang digunakan membiayai pembangunan yang dapat menghasilkan penerimaan kembali untuk pembayaran pinjaman dan pelayanan masyarakat.
- Pinjaman jangka pendek untuk pengaturan arus kas

c. Ketentuan yang menyangkut prosedur

- Mendapat persetujuan DPRD
- Dituangkan dalam kontrak

4. Rasio Pertumbuhan APBD

Yaitu rasio yang mengukur seberapa besar kemampuan Pemda dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya untuk masing-masing sumber pendapatan dan pengeluaran. Dengan diketahuinya pertumbuhan untuk masing-masing komponen

tersebut, dapat digunakan mengevaluasi potensi-potensi mana yang perlu mendapatkan perhatian.

Adapun pihak-pihak yang berkepentingan dalam rasio keuangan pada APBD adalah :

1. DPRD sebagai wakil dari pemilik daerah (masyarakat).
2. Pihak eksekutif sebagai landasan dalam menyusun APBD berikutnya.
3. Pemerintah pusat/provinsi sebagai bahan masukan dalam pembinaan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah
4. Masyarakat dan kreditor sebagai pihak yang turut memiliki saham pemerintah daerah, bersedia memberikan pinjaman ataupun membeli obligasi.

Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial (Mardiasmo,2002:61). Penganggaran sektor publik terkait dengan proses penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap program dan aktivitas dalam satuan moneter. Aspek-aspek yang harus tercakup dalam anggaran sektor publik meliputi aspek perencanaan, aspek pengendalian dan aspek akuntabilitas publik.

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana kegiatan pemda yang dituangkan dalam bentuk angka dan menunjukkan adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal dan biaya yang merupakan batas maksimal untuk suatu periode anggaran (Halim, 2004:22). Dari definisi tersebut menunjukkan bahwa suatu anggaran daerah termasuk APBD memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Rencana kegiatan suatu daerah beserta uraiannya secara rinci.
2. Adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal untuk menutupi biaya-biaya sehubungan dengan aktivitas tersebut.
3. Jenis kegiatan dan proyek yang dituangkan dalam bentuk angka.

4. Periode anggaran, yaitu umumnya satu tahun.

Pengertian *governance* dapat diartikan sebagai cara mengelola urusan-urusan publik. *World Bank* memberikan definisi *governance* sebagai “*the way state power is used in managing economic and social resources for development of society*”. Sedangkan *United Nation Development Program (UNDP)* mendefinisikan *governance* sebagai “*the exercise of political, economic, and administrative authority to manage a nation’s affair at all levels*”. Dalam hal ini, *World Bank* lebih menekankan pada cara pemerintah mengelola sumber daya sosial dan ekonomi untuk kepentingan pembangunan masyarakat, sedangkan UNDP lebih menekankan pada aspek politik, ekonomi, dan administratif dalam pengelolaan negara.

UNDP memberikan beberapa karakteristik pelaksanaan *good governance*, meliputi :

1. *Participation*. Keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.
2. *Rule of law*. Kerangka hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu.
3. *Transparency*. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan.
4. *Responsiveness*. Lembaga-lembaga publik harus cepat dan tanggap dalam melayani *stakeholder*.
5. *Consensus orientation*. Berorientasi pada kepentingan masyarakat yang lebih luas.
6. *Equity*. Setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan dan keadilan.

7. *Efficiency and Effectiveness*. Pengelolaan sumber daya publik dilakukan secara berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif).
8. *Accountability*. Pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan.
9. *Strategic vision*. Penyelenggara pemerintahan dan masyarakat harus memiliki visi jauh ke depan.

1.6 Metodologi Penelitian

1.6.1 Objek Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan pada Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Pemb. Tanjabbar) dan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Pemb. Tanjabtim). Untuk mempermudah pemecahan masalah dan agar lebih terarah maka penulis akan membatasi ruang lingkup pembahasan dalam penelitian ini yaitu hanya masalah yang berhubungan dengan judul penelitian ini yang didasarkan pada data yang terdapat pada perhitungan APBD Kab. Tanjabbar dan Kab. Tanjabtim tahun anggaran 2005-2007.

1.6.2 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Studi lapangan (*Field Research*)

Penulis melakukan survei atau penelitian langsung ke perusahaan yang menjadi objek penelitian dengan maksud memperoleh data primer. Data primer diperoleh dengan cara:

- a. Wawancara (*interview*) yaitu mengadakan tanya jawab langsung dengan pihak yang terkait guna mendapatkan informasi yang dibutuhkan sehubungan dengan penulisan skripsi ini.

b. Dokumentasi (*documentation*) yakni dengan melakukan penelitian terhadap sumber-sumber dokumen yang berkaitan dengan penelitian yang diperoleh dari arsip badan serta instansi yang terkait di lingkungan Pemkab. Tanjabbar dan Pemkab. Tanjabt看.

2. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Metode ini dilaksanakan dengan maksud memperoleh data penunjang yang berfungsi sebagai landasan teori yang berguna untuk mendukung data primer yang diperoleh di dalam penelitian. Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara mengkaji dan menelaah buku-buku, majalah, artikel, literatur serta sumber-sumber ilmiah lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.

1.6.3 Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Analisis Kuantitatif

Metode analisis data ini dilakukan dengan menganalisis data yang diperoleh melalui perhitungan rasio keuangan dari APBD Pemkab. Tanjabbar dan Tanjabt看. Adapun rasio-rasio yang dapat dikembangkan berdasarkan APBD ialah sebagai berikut :

a. Rasio Kemandirian Daerah

Yaitu rasio yang menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern. Semakin tinggi rasio kemandirian berarti semakin rendah tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern (terutama pemerintah pusat dan provinsi) dan demikian pula sebaliknya.

$$\text{Rasio Kemandirian Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat/Provinsi dan Pinjaman}}$$

Tabel 1.1

Kriteria Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio Kemandirian (%)	Kriteria Kemandirian Keuangan
0 – 25	Rendah Sekali
> 25 – 50	Rendah
> 50 – 75	Sedang
> 75 – 100	Tinggi

Sumber: Paul Hersey dan Kenneth Blanchard

b. Rasio Efektivitas dan Efisiensi PAD

Rasio Efektivitas menggambarkan kemampuan Pemda dalam merealisasikan PAD yang direncanakan, dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai mencapai minimal sebesar 1 (satu) atau 100%.

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}}$$

Tabel 1.2

Kriteria Pengukuran Efektivitas dengan Penilaian Kinerja Anggaran

Kinerja Keuangan (%)	Kriteria Efektivitas
> 100	Sangat Efektif
90 – 100	Efektif
80 – 90	Cukup Efektif
60 – 80	Kurang Efektif
< 60	Tidak Efektif

Sumber : Depdagri, Kepmendagri No. 690.900-327, Tahun 1996

Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja pemda dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau di bawah 100 %.

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Biaya yang dikeluarkan untuk memungut PAD}}{\text{Realisasi penerimaan PAD}}$$

Apabila biaya yang dikeluarkan untuk memungut PAD tidak tercantum maka analisis efisiensi dapat dihitung dengan cara berikut :

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{(\text{pajak daerah} + \text{retribusi daerah}) \times 5\% \times 12 \text{ bulan}}{\text{Realisasi Penerimaan Daerah}}$$

Tabel 1.3

Kriteria Pengukuran Efisiensi dengan Penilaian Kinerja Anggaran

Persentase Keuangan (%)	Kriteria Efisiensi
> 100	Tidak Efisien
90 – 100	Kurang Efisien
80 – 90	Cukup Efisien
60 – 80	Efisien
< 60	Sangat Efisien

Sumber : Depdagri, Kepmendagri No. 690.900-327 tahun 1996

c. Rasio Keserasian

Yaitu rasio yang menggambarkan bagaimana pemda memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin berarti persentase belanja pembangunan yang digunakan untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil.

$$\text{Rasio Belanja Rutin terhadap APBD} = \frac{\text{Total belanja rutin}}{\text{Total APBD}}$$

$$\text{Rasio Belanja Pembangunan terhadap APBD} = \frac{\text{Total belanja pembangunan}}{\text{Total APBD}}$$

d. *Debt Service Coverage Ratio (DSCR)*

Yaitu rasio yang digunakan sebagai kajian atas kemampuan pemda untuk melakukan pinjaman.

$$DSCR = \frac{(\text{PAD} + \text{BD} + \text{DAU}) - \text{BW}}{\text{Total (pokok angsuran} + \text{bunga} + \text{biaya pinjaman)}}$$

Keterangan :

PAD = Pendapatan Asli Daerah

BD = Bagian Daerah (Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak)

DAU = Dana Alokasi Umum

BW = Belanja Wajib

Adapun tindakan yang dapat diambil berdasarkan model DSCR ini ialah:

- Jika $DSCR > 2,5$ maka pemda dapat melakukan pinjaman baru
- Jika $DSCR = 2,5$ maka pemda dapat melakukan pinjaman baru dengan syarat proyek/kegiatan yang akan dilaksanakan menghasilkan keuntungan (*cost recovery*)
- Jika $DSCR < 2,5$ maka pemda tidak dapat melakukan pinjaman baru.

e. Rasio Pertumbuhan

Yaitu rasio yang mengukur seberapa besar kemampuan pemda dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya untuk masing-masing sumber pendapatan dan pengeluaran.

2. Analisis Kualitatif

Analisis ini dilakukan dengan membandingkan teori-teori yang bersifat umum yang dijadikan kerangka berpikir dibandingkan dengan fakta yang sesungguhnya terjadi. Dengan analisis ini, penulis akan mengumpulkan, menyusun, dan mengevaluasi serta menginterpretasikan data yang diperoleh kemudian menarik kesimpulan.

1.7 Sistematika Penelitian

Sistematika pembahasan yang direncanakan dalam penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, yaitu:



DAFTAR PUSTAKA



Bastian, Indra. 2006. *Sistem Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi 2. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.

Dwirandra, A.A.N.B. "Efektivitas dan Kemandirian Keuangan Daerah Otonom Kabupaten/Kota Di Propinsi Bali Tahun 2002 – 2006". Diambil pada tanggal 1 April 2009 dari www.tkp2e-dak.org/dokum/kajian/520dwirandra.pdf

Halim, Abdul. 2004. *Akuntansi Sektor Publik-Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.

Harahap, Sofyan Syafri. 1998. *Analisis Kritis atas Laporan Keuangan*. Jakarta: Penerbit Grafindo Persada.

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. 2005. *Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.

Mahsun, Sulistiyawati, Firma, Purwanugraha, Heribertus Andre. 2005. *Akuntansi sektor Publik*. Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE.

Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Pertama. Yogyakarta: Penerbit Andi.

_____. 2006. "Pewujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana *Good Governance*", *Jurnal Akuntansi Pemerintah*, Vol. 2, No. 1, Mei 2006, pp 1-17. Diambil pada tanggal 22 Oktober 2008 dari <http://www.bppk.go.id>.

Mustofa, Hamim. 2006. "Basis Akuntansi Pemerintahan", *Direktorat Jendral Perbendaharaan*. Diambil pada tanggal 22 Oktober 2008 dari <http://www.perbendaharaan.go.id/perben/index.php>.

Modul 2 "Manajemen Keuangan Daerah". Diambil pada tanggal 30 Maret 2009 dari <http://www.scribe.com/doc/mobile/documents/2908473>.

Nordiawan, Deddi. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.

Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. 2006. *Profil Kabupaten Tanjung Jabung Barat*. Kuala Tungkal.

_____. 2006. *Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 2 Tahun 2006 tentang Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005*. Kuala Tungkal.

_____. 2006. *Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 30 Tahun 2006 tentang Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006*. Kuala Tungkal.

- _____. 2007. *Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 4 Tahun 2007 tentang Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007*. Kuala Tungkal.
- Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. 2006. *Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 24 Tahun 2006 tentang Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005*. Muara Sabak.
- _____. 2007. *Publikasi Profil Daerah Tahun 2007*. Edisi Semester I. Muara Sabak.
- _____. 2007. *Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 3 Tahun 2007 tentang Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006*. Muara Sabak.
- _____. 2008. *Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 8 Tahun 2008 tentang Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007*. Muara Sabak.
- Republik Indonesia. 2003. *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara*. Jakarta.
- _____. 2004. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara*. Jakarta.
- _____. 2004. *Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengawasan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara*. Jakarta.
- _____. 2004. *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta.
- _____. 2004. *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*. Jakarta.
- _____. 2004. *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*. Jakarta.
- _____. 2005. *Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah*. Jakarta.
- Yuwono, Sony, Indrajaya, Tengku Agus, Hariyandi. 2005. *Penganggaran Sektor Publik*. Malang: Bayumedia Publishing.